

**PERMOHONAN TALAK KARENA MENINGGALKAN KEWAJIBAN
(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor:
2112/Pdt.G/2018/PA.PML)**

**Oleh :
Ewi Lusfriana
E1A017384**

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, namun kenyataannya tujuan perkawinan terkadang tidak tercapai sehingga suatu perkawinan akan berujung pada perceraian.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memutus permohonan talak karena meninggalkan kewajiban dalam Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor: 2112/Pdt.G/2018/PA.PML. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normaif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permohonan talak karena meninggalkan kewajiban pada Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor: 2112/Pdt.G/2018/PA.PML menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Hakim hanya mendasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara cerai talak sebaiknya dilengkapi dengan Pasal 33 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata kunci : *Permohonan Talak, Kewajiban*

**REQUEST FOR DIVORCE FOR NOT FULFILLING THE OBLIGATION
(Judicial Review Of Pemalang Religion Court Decision No.
2112/Pdt.G/2018/PA.PML)**

**By :
Ewi Lusfriana
E1A017384**

ABSTRACT

According to Article 1 the law Number 1 of 1974 about the marriages, it was stated that "Marriage is a bond born inner between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming families (household) who happy lasting based on the only One God", but in reality sometimes the purpose of a marriage is not sufficient so a marriage will lead to divorce.

The problem in this research is regarding the judges' legal considerations in deciding the request for divorce for not fulfilling the obligation in the Pemalang Religious Court Decision Number: 2112/Pdt.G /2018/PA.PML. Methods used in this research is normative juridical, specification prescriptive research analysis, the study data collection techniques literature available with inventory, the data collected then presented in the form of narrative text and qualitative normative analysis.

Based on the results of research and discussion regarding request for divorce for not fulfilling the obligation in the Pemalang Religious Court Decision Number: 2112/Pdt.G /2018/PA.PML shows that the Judge's legal considerations are only based on Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 and Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law. According to researchers, judges' legal considerations in deciding cases must be complemented by Article 33 and Article 6 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974.

Keywords: Request for Divorce, Obligation